

Ikhtisar Webinar

# Indonesia dalam Pusaran Dinamika Persenjataan AUKUS-China



## Indonesia dalam Pusaran Dinamika Persenjataan AUKUS-China

05 Oktober 2021 | 19.00-21.00 WIB

Webinar 'Indonesia dalam Pusaran Dinamika Persenjataan AUKUS-China' dimoderatori oleh Mutti Anggitta dan dibuka oleh Andi Widjanto. Diskusi ini menghadirkan tim peneliti yang dipimpin oleh Iis Gindarsah selaku Analis Politik dan Keamanan Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) dan Curie Maharani dari Universitas Bina Nusantara. Selain itu, dihadirkan juga penanggap hasil riset, yaitu Evan Laksmana dari National University of Singapore dan Anton Aliabbas dari Universitas Paramadina.

Dalam memaparkan hasil riset bertajuk dinamika persenjataan, tim peneliti LAB45 dibantu oleh Febry Triantama dan Reine Prihandoko. Febry memulai paparan dengan menunjukkan bahwa dinamika persenjataan global dapat dilihat sebagai spektrum kepemilikan sistem senjata oleh militer suatu negara. Salah satu ujung spektrum tersebut adalah negara dengan kemampuan RMA dan ujung lainnya adalah negara yang melakukan pengurangan senjata. Di antaranya terdapat kategori negara yang melakukan pembangunan senjata, modernisasi senjata, dan pemeliharaan senjata. Dalam menentukan kemampuan persenjataan global, sistem senjata yang dimiliki suatu negara dikelompokkan ke dalam 11 kategori dan kemudian dikomparasikan untuk melihat distribusi kapasitas militer global. Dalam konteks AUKUS-China, distribusi AS cenderung dominan karena melakukan penggelaran militer di seluruh kawasan. Dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia memiliki kemampuan angkatan laut yang dominan dibandingkan negara lainnya dengan ditopang oleh kemampuan operasi amfibi dan tempur laut. Namun, adanya ketimpangan dengan sistem lain mengindikasikan belum adanya perkembangan kemampuan tempur terpadu/gabungan. Tim peneliti menemukan pembangunan persenjataan TNI berfokus pada tempur laut dan peluru kendali, sedangkan sistem persenjataan lain cenderung stagnan.

Reine melanjutkan paparan dari hasil kajian posisi Indonesia dalam pusaran dinamika persenjataan global berdasarkan tiga determinan: yaitu (1) ekonomi pertahanan, (2) teknologi pertahanan dan (3) potensi pertahanan. Posisi Indonesia termasuk rendah menurut determinan ekonomi pertahanan yang ditentukan oleh

proporsi belanja pertahanan, anggaran pertahanan, dan anggaran riset dibandingkan PDB. Sementara itu, posisi Indonesia tergolong cukup baik di antara negara-negara Asia Tenggara dalam determinan potensi pertahanan yang dipengaruhi oleh ambisi pertahanan, tenaga kerja industri strategis, output industri strategis, dan edukasi tersier. Ambisi pertahanan dicirikan bagaimana orientasi negara terhadap kemandirian industri pertahanannya. Tenaga kerja dan output industri strategis ditentukan dengan membandingkan nilai industri tersebut dengan sektor industri lain. Lalu, edukasi tersier menunjukkan kesiapan sumber daya manusia untuk mendukung industri strategis. Terakhir, Indonesia berada di bawah rata-rata berdasarkan determinan teknologi pertahanan yang diukur dari tingkat dependensi teknologi asing, diversifikasi pemasok teknologi, dan inventori teknologi baru. Pada dependensi teknologi asing, semakin rendah persentase kepemilikan alutsista asing, maka semakin tinggi kemampuan negara dalam dinamika persenjataan global. Sementara itu, kondisi negara semakin ideal apabila semakin banyak negara sumber pemasok teknologi dan semakin besar persentase inventori senjatanya yang berteknologi mutakhir.

Dari distribusi kemampuan negara berdasarkan tipologi kepemilikan sistem senjata dan tiga determinan dinamika persenjataan global tadi, posisi negara-negara yang menjadi objek komparasi dapat dipetakan ke dalam spektrum yang telah disebutkan. AS, China dan Korsel berada pada ujung spektrum RMA. Negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tergolong sebagai negara yang melakukan pemeliharaan senjata. Namun, Singapura lebih maju dengan melakukan pembangunan senjata, sementara Filipina melakukan reduksi senjata.

Curie Maharani melanjutkan dengan beberapa rekomendasi yang dapat diambil pemerintah untuk dapat meningkatkan posisi Indonesia di dalam spektrum dinamika persenjataan global berdasarkan temuan dari riset tersebut. Pertama, dengan mengakuisisi teknologi alutsista yang mengarah pada operasi gabungan. Dalam ekonomi pertahanan, peningkatan anggaran belanja dapat diartikan sebagai faktor pengubah (*key modifier*). Apabila tidak ditingkatkan, maka implikasinya adalah Indonesia akan kesulitan dalam menghadapi ancaman strategis yang dialami sekarang ini. Dalam potensi pertahanan, Indonesia bisa meningkatkan posisinya dengan meningkatkan penerimaan edukasi tersier. Rekomendasi lainnya yang dapat

dilakukan adalah tidak hanya meningkatkan anggaran penelitian dan pengembangan, tapi juga mengupayakan lisensi teknologi mutakhir yang dilakukan dengan memaksimalkan ofset. Oleh karenanya, Indonesia diharapkan tidak hanya meningkatkan inventori teknologi mutakhir, tetapi juga memproduksi teknologi tersebut.

Evan Laksmana menanggapi bahwa persoalan mengenai perimbangan kekuatan militer tidak hanya bertumpu pada teknologi, tetapi juga doktrin, struktur organisasi, *operational readiness* hingga *exercise*, sehingga akan lebih tepat untuk melihat dinamika persenjataan global dalam kasus ini sebagai *balance of military technology* agar hasil riset yang disajikan tidak semata-merta diartikan sebagai *balance of military power*. Perihal sistem persenjataan yang mendukung operasi gabungan, harus ada *benchmark* yang ideal untuk menilai bagaimana kualitas doktrin operasi gabungan yang dimiliki negara, sehingga bisa dapat menentukan sistem senjata yang seperti apa yang diperlukan negara. Dari hasil riset yang disajikan seharusnya perlu dikaji apakah alutsista yang dimiliki sudah sesuai dengan doktrin operasi gabungan yang dimiliki suatu negara.

Dari segi ekonomi pertahanan, penting untuk melihat tidak hanya ukuran dari total anggaran pertahanan, tetapi juga alokasinya. Ini dikarenakan jika menggunakan ukuran anggaran pertahanan secara rata-rata, maka yang dihitung adalah jumlah personel, bukan kemampuan teknologi. Ini akan menimbulkan *misleading* apabila riset digunakan untuk menunjukkan kemampuan teknologi persenjataan. Dalam spektrum dinamika persenjataan, perlu diperjelas ukuran yang digunakan untuk mengategorikan negara-negara ke dalam spektrum tersebut. Ini dikarenakan kategori yang digunakan tidaklah *mutually exclusive*. Satu tahapan dari kategori tersebut tidak bisa dilakukan tanpa melakukan kategori yang lain. Ditambah lagi teknologi yang dimiliki di tiap-tiap tipologi senjata mempunyai perubahan teknologi yang berbeda. Melihat data yang disajikan dalam riset, Indonesia dalam menghadapi dinamika AUKUS-China sudah dianggap tertinggal. Sehingga perlu diusulkan apa kebijakan yang diambil di luar mengejar ketertinggalan kemampuan persenjataan, baik dari strategi militer maupun diplomasi pertahanan.

Anton Aliabbas menanggapi perihal operasi gabungan yang perlu ditegaskan lagi definisi operasionalnya yang digunakan di riset ini dan bagaimana menjadi penting

untuk melihat kemampuan Indonesia dalam dinamika persenjataan global. Dalam hal anggaran pertahanan, rekomendasi untuk meningkatkan anggaran pertahanan tidak akan berarti banyak jika postur anggaran atau alokasi anggarannya tidak berubah. Kemudian, dengan melihat data kuantitatif, ada kemungkinan *misleading* jika inventori alutsista yang terhitung tidak mempertimbangkan faktor *operational readiness* dari masing-masing alutsista.

Para narasumber menanggapi komentar penanggap terhadap rekomendasi kebijakan yang diambil. Untuk jangka menengah-panjang, dapat melakukan *balancing* terutama dalam kaitannya dengan koalisi industri pertahanan. Koalisi ini tidak hanya dibentuk secara bilateral, tetapi juga memasukkan berbagai negara agar mempertahankan otonomi strategis di politik global. Temuan dari riset ini juga menunjukkan adanya korelasi antara dinamika persenjataan negara dengan *soft power*, meskipun tidak banyak namun dapat dibuktikan bahwa melakukan diplomasi dengan membangun kekuatan militer dapat dilakukan secara paralel.

Pada sesi pertanyaan, Mutti menyampaikan pertanyaan dari kolom komentar terkait penerapan politik bebas aktif, sumber kekuatan asimetris Indonesia, serta sistem pemerintahan demokrasi dan autokrasi dalam dinamika persenjataan global. Baik narasumber dan penanggap dapat dengan baik menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Prinsip bebas aktif tidak perlu diperdebatkan lagi, namun yang perlu dikembangkan adalah *terms of engagement* tanpa bergabung dalam aliansi formal. Sumber kekuatan asimetris Indonesia dapat dimaksimalkan melalui pengembangan kemampuan *anti-access* di tempat-tempat *chokehold* perairan Indonesia. Kemudian, meskipun banyak studi yang mengemukakan bahwa aliansi dibentuk berdasarkan kemiripan tipe rezim, namun dalam konteks Indonesia, ada suatu ketidaksinambungan antara tipe rezim dengan perumusan kebijakan strategisnya.



Jl. Mabas Hankam No. T65,  
Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur.



Selasa, 05 Oktober  
2021

➔ +62 812 8218 4545

➔ lab45@lab45.id

➔ www.lab45.id